

Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokertokota.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5/HK.01/K.JI-35/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO NOMOR : 022/K.JI-35/HM.00/V/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto; dan
 - c. Adanya mutasi dan promosi yang mempengaruhi struktur organisasi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan

- sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Mojokerto;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 17 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati, S.Pd

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
 - 4. Yang bersangkutan.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pembina
2.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eri Setiawan, S.M	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Tim Pertimbangan PPID
4.	Yoga Ricky Agung. W., A.Md	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Atasan PPID
5.	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	PPID
6.	Syeh Anggoro Guntur Prakoso, S.H	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Layanan Informasi
7.	Ratna Nuzila, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum	Petugas Layanan Informasi
8.	Muhammad Eko Saputro, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum	Petugas Layanan Informasi
9.	Lilik Nurhidayati	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi
10.	Ashim Murtadlo, S.Pd.I	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi
11.	Yati Suswanto	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi
12.	Yenita Wahyu Erlandani, S.E	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



BAGAN STRUKTUR PPID
BAWASLU KOTA MOJOKERTO

PEMBINA
Dian Pratmawati, S.Pd.
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto

ATASAN PPID
Yoga Ricky Agung. W., A.Md
Plh. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Mojokerto

TIM PERTIMBANGAN PPID
1. Ilham Bagus Priminanda, S.Kom
Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
2. Eri Setiawan, S.M
Anggota Bawaslu Kota Mojokerto

PPID
Guruh Wiweka Nugraha
BPP Bawaslu Kota Mojokerto

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Syeh Anggoro Guntur Prakoso, S.H</u> Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Ratna Nuzila, S.H</u> Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Lilik Nurhidayati</u> Staf Subbagian Administrasi
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Muhammad Eko Saputro, S.H</u> Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Ashim Murtadlo, S.Pd.I</u> Staf Subbagian Administrasi	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Yati Suswanto</u> Staf Subbagian Administrasi
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI <u>Yenita Wahyu Erlandani, S.E</u> Staf Subbagian Administrasi		